

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi manufaktur, khususnya terkait industri semikonduktor dan *chip*, telah menjadi salah satu pilar penting dalam struktur ekonomi global kontemporer. Pada era kapitalisme global yang ditandai dengan integrasi pasar, rantai nilai global, dan dominasi perusahaan multinasional, *chip* tidak hanya berfungsi sebagai komoditas ekonomi, namun juga menjadi instrumen kekuasaan negara.¹ Negara-negara berupaya untuk menguasai sistem produksi, mengamankan jalur distribusi, dan mempertahankan dominasinya dalam pengembangan industri semikonduktor dan *chip*. Teknologi semikonduktor menjadi fondasi bagi berbagai sektor vital, mulai dari industri sipil, *artificial intelligence* (kecerdasan buatan/AI), hingga menjadi komponen penting dalam persenjataan modern. Dengan demikian, kontrol atas produksi dan distribusi *chip* memiliki implikasi langsung terhadap kekuatan ekonomi, keamanan nasional, dan posisi negara dalam hierarki sistem internasional.

Dalam mencapai kepentingan nasional, negara dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang kompleks untuk membentuk kebijakan luar negeri yang relevan dengan isu yang menjadi fokus negara. Negara menggunakan kebijakan ekonomi, perdagangan, dan teknologi berupaya untuk mempertahankan kepentingan strategisnya dalam sistem global, pada saat yang sama pasar dan aktor ekonomi seperti perusahaan teknologi berupaya

¹ Jin-chi Hsieh, "The Effect of Innovation Strategies on the Business Performance of Global Semiconductor Firms," no. December (2023): 1–18, <https://doi.org/10.1177/21582440231201543>.

untuk memengaruhi kebijakan negara demi keberlanjutan atas akumulasi kapital.² Gesekan antara kebijakan strategis (keamanan nasional) dan logika ekonomi pasar diterjemahkan melalui proses politik domestik yang kompleks.

Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok menunjukkan interaksi antara kepentingan keamanan nasional dan akumulasi kapital dalam sistem global. Rivalitas ini tidak bersifat ideologis atau militer semata, namun juga bersifat struktural dalam penguasaan teknologi strategis dan rantai nilai global (*global value chains*). Amerika Serikat konsisten dengan kebijakan pembatasan ekspor *chip* ke Tiongkok sejak akhir tahun 2022, hal ini mencerminkan upaya negara untuk memanfaatkan kekuatan strukturalnya dalam sistem ekonomi global untuk membatasi kemampuan teknologi negara pesaing.³

Memasuki tahun 2026, Tiongkok dilaporkan melakukan pemesanan *chip* Nvidia H200 dari Nvidia, sebuah perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, dengan nilai transaksi mencapai sekitar 238 triliun rupiah.⁴ Hal ini sangat kontradiktif dengan kebijakan AS tiga tahun terakhir yaitu memberlakukan pembatasan ketat terkait *chip* AI canggih ke Tiongkok. Adanya kebijakan terkait ekspor *chip* canggih ini dinilai menimbulkan risiko keamanan nasional

² Bruce R Scott, "The Political Economy of Capitalism," 2006.

³ Hai Yang, "Securitization , Frame Alignment , and the Legitimation of US Chip Export Controls on China," *The Pacific Review* 37, no. 5 (2024): 961–84, <https://doi.org/10.1080/09512748.2023.2288961>.

⁴ CNBC Indonesia, "Direstui Trump, China Langsung Borong Chip AS Bernilai Rp 238 Triliun," *CNBC*, 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20251231141858-37-698692/direstui-trump-china-langsung-borong-chip-as-bernilai-rp-238-triliun#:~:text=Direstui Trump%2C China Langsung Borong Chip AS Bernilai Rp 238 Triliun>.

serius, kehilangan dominasi AS pada sektor teknologi canggih, dan risiko pengalihan teknologi (*dual use*) yang bisa saja dimanfaatkan oleh Tiongkok.⁵

Kekhawatiran AS akan pemanfaatan *chip* AI canggih ini bukan tanpa alasan, karena beberapa tahun terakhir Tiongkok sangat gencar untuk mengembangkan teknologi militernya dan sangat bergantung pada penggunaan AI. Namun, untuk mengembangkan teknologi militernya Tiongkok sangat bergantung pada *chip* canggih buatan AS seperti Nvidia seri H yang aksesnya sangat terbatas.⁶ Bergabungnya Jepang dan Belanda pada kampanye AS terkait pembatasan ekspor teknologi manufaktur seperti alat litografi menekan Tiongkok untuk tetap bergantung pada *chip* canggih buatan AS.

Politik domestik AS memperlihatkan adanya tarik ulur dan negosiasi yang terjadi dibalik pembentukan kebijakan ekspor *chip* canggih AS ke Tiongkok. Kebijakan ini diawali dengan perintah presiden melalui “*Executive Orders*” dengan regulasi teknis dari *Bureau of Industry and Security* (BIS) di bawah Departemen Perdagangan, yang menjalankan wewenangnya melalui *Export Administration Regulations* (EAR).⁷ Kerangka regulasi ini memungkinkan BIS untuk menerapkan kontrol ketat dan terus berkembang terkait komputasi canggih dan semikonduktor. Proses pembentukan kebijakan ini melibatkan identifikasi ancaman dari pengalihan teknologi (*dual use*), yang kemudian

⁵ Chris Mcguire, “The New AI Chip Export Policy to China: Strategically Incoherent and Unenforceable,” *Council of Foreign Relations*, 2026, <https://www.cfr.org/articles/new-ai-chip-export-policy-china-strategically-incoherent-and-unenforceable>.

⁶ Sam Bresnick, “China’s Military AI Roadblocks PRC Perspectives on Technological Challenges to Intelligentized Warfare,” 2024, <https://doi.org/10.51593/20230042>.

⁷ John Krige and John Krige, “Debate : Building a U . S . Regulatory Empire in the Chip War with China Debate : Building a U . S . Regulatory Empire in the Chip War with China” 65, no. 4 (2026): 1081–1108.

direspons dengan memasukkan entitas-entitas Tiongkok, termasuk perusahaan fabrikasi semikonduktor dan entitas terkait militer, ke dalam daftar entitas (*entity list*). Pada tahun 2024, BIS memperkuat kebijakan ini dengan menambahkan 140 entitas baru ke dalam daftar tersebut. Keputusan akhir atas kontrol ini merupakan hasil dari tinjauan antar lembaga yang ketat, melibatkan Departemen Pertahanan (Pentagon), Departemen Luar Negeri, dan Badan Intelijen yang bertujuan untuk menyeimbangkan mitigasi risiko militer dengan kelangsungan perdagangan non-sensitif.⁸

Di dalam pemerintahan AS, terdapat perbedaan penekanan dalam merumuskan kebijakan ekspor *chip* ini. Di satu sisi, Pentagon dan komunitas intelijen cenderung mendorong pembatasan yang lebih ketat karena kekhawatiran terhadap pemanfaatan *chip* canggih untuk pengembangan AI militer Tiongkok. Sebaliknya, BIS di bawah Departemen Perdagangan kerap mengambil pendekatan yang lebih moderat dengan mempertimbangkan dampak ekonomi. Hal ini tercermin dalam kebijakan peninjauan lisensi yang terus disesuaikan, di mana BIS masih memungkinkan ekspor untuk beberapa jenis *chip* tertentu ke Tiongkok dengan persyaratan lisensi, sebagai bentuk kompromi antara keamanan nasional dan kepentingan industri AS.⁹

Perbedaan pendekatan ini juga terlihat dalam spektrum politik di AS. Pemerintahan di era Biden dikenal dengan pendekatan “*small yard, high fence*” (halaman kecil, pagar tinggi).¹⁰ Strategi ini memfokuskan kontrol pada

⁸ Huan He et al., “The Influence of the U . S . Export Controls against China on the Resilience of Chinese Corporates,” 2025, 1–25, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0331222>.

⁹ Yujun Cong, “The U . S . Trade Control Legal System and Chinese Enterprises ’ Responses” 5, no. 8 (2025): 388–400.

¹⁰ Australia & USA: Two Approaches to Illegal Migration. (2022). *SŠA & Kanada: Èkonomika, Politika, Kul'tura*, 5. <https://doi.org/10.31857/s2686673022050054>

teknologi paling kritis dan canggih, sementara tetap mengizinkan perdagangan untuk *chip* generasi lama dan produk non sensitif lainnya. Sebaliknya, fraksi partai republikan di kongres mendorong kebijakan yang lebih agresif dan komprehensif, termasuk penutupan celah regulasi serta pembatasan praktik perusahaan yang harus menyesuaikan produk untuk tetap dapat mengakses pasar Tiongkok.

Intervensi dari perusahaan teknologi domestik AS juga menambah kompleksitas dari kebijakan ini. Perusahaan-perusahaan ini aktif melakukan lobi ke Gedung Putih, menyuarakan kekhawatiran bahwa larangan total akan secara signifikan memangkas pangsa pasar AS di Tiongkok, yang dapat merugikan pendanaan untuk penelitian dan pengembangan di dalam negeri. Tekanan ini terkadang menghasilkan kelonggaran kebijakan, seperti pemberian lisensi sementara untuk penjualan *chip* dengan performa yang sudah dikurangi seperti Nvidia H20.¹¹

Perubahan arah kebijakan Amerika Serikat yang semula konsisten membatasi ekspor *chip* canggih ke Tiongkok, kemudian kembali membuka ekspor mencerminkan adanya pergeseran strategis dalam pengelolaan teknologi sensitif. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kebijakan ekspor *chip* merupakan instrumen strategis yang dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara kepentingan ekonomi, tekanan industri domestik, dan pertimbangan keamanan nasional. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor politik domestik yang membentuk kebijakan tersebut menjadi penting untuk dilakukan untuk melihat gesekan kepentingan antar aktor yang terlibat dibaliknya.

¹¹ Emily Wilkins, "Congress Takes on Nvidia, White House as It Pushes for Chip Export Limits," *CNBC*, February 26, 2026, <https://www.cnbc.com/2026/02/26/congress-pushes-back-on-nvidia-white-house-with-chip-export-limits.html>.

1.2 Rumusan Masalah

Risiko pemanfaatan *chip* canggih Amerika Serikat oleh Tiongkok untuk pengembangan *artificial intelligence* (AI) dan modernisasi militer dinilai dapat mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Meskipun demikian, Amerika Serikat tetap membuka ruang ekspor *chip* ke Tiongkok karena adanya kepentingan ekonomi domestik dan ketergantungan perusahaan teknologi Amerika Serikat terhadap pasar Tiongkok. Di sisi lain, pembatasan ekspor yang terlalu ketat dinilai dapat mendorong Tiongkok untuk mempercepat pengembangan teknologi *chip* domestik melalui investasi besar pada penelitian, manufaktur semikonduktor, dan penguatan rantai pasok nasional guna mengurangi ketergantungan terhadap teknologi Amerika Serikat. Selain itu, perusahaan teknologi domestik menilai pembatasan ekspor berpotensi memangkas pangsa pasar dan mengurangi pendanaan penelitian serta pengembangan industri semikonduktor Amerika Serikat. Kondisi ini menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan antar organisasi politik domestik Amerika Serikat, mulai dari lembaga keamanan nasional, birokrasi ekonomi, hingga perusahaan teknologi domestik, dalam membentuk kebijakan ekspor *chip* ke Tiongkok. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor politik domestik AS yang mempengaruhi terbentuknya kebijakan peningkatan ekspor *chip* AS ke Tiongkok pada tahun 2025.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang ingin diajukan adalah “Apa saja

faktor politik domestik yang mempengaruhi Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan peningkatan ekspor *chip* ke Tiongkok pada tahun 2025?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam dan memperbaiki pemahaman akademik mengenai kebijakan peningkatan ekspor *chip* Amerika Serikat ke Tiongkok pada tahun 2025, khususnya dalam kerangka analisis kebijakan luar negeri. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akademik terhadap faktor-faktor politik domestik yang memengaruhi dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri yang melibatkan interaksi antar aktor negara, kepentingan ekonomi domestik, dan struktur ekonomi global. Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan menghasilkan analisis yang bermanfaat bagi pengembangan studi hubungan internasional, sekaligus menawarkan sintesis pemahaman baru mengenai kebijakan luar negeri negara adidaya di tengah persaingan teknologi global.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat praktis dan akademis yang saling berkaitan:

1. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam memahami implikasi kebijakan teknologi strategis terhadap dinamika hubungan internasional dan stabilitas ekonomi global. Selain itu, bagi pelaku industri, analis, dan masyarakat luas, penelitian ini membantu meningkatkan pemahaman mengenai arah kebijakan Amerika Serikat serta dampaknya terhadap rantai pasok

teknologi global dan persaingan ekonomi internasional, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih adaptif.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian hubungan internasional, khususnya dalam analisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bidang teknologi strategis. Kajian ini tidak hanya menambah literatur mengenai isu ekspor chip ke Tiongkok yang masih relatif terbatas, tetapi juga menawarkan perspektif alternatif yang melampaui pendekatan struktural dan negara-sentris dengan menyoroti secara spesifik faktor-faktor politik domestik yang mempengaruhi terbentuknya kebijakan peningkatan ekspor *chip* AS ke Tiongkok. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman akademik terkait dinamika dan proses perumusan kebijakan luar negeri pada konteks yang lebih spesifik.

1.6 Studi Pustaka

Dalam rangka menyelesaikan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, peneliti berupaya untuk mengumpulkan berbagai data yang relevan dan dapat digunakan menjadi landasan teoritis dan empiris. Data tersebut dihimpun melalui serangkaian karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan referensi ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang komprehensif terkait isu yang dikaji, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang belum dibahas secara mendalam pada studi sebelumnya. Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini diharapkan dapat

memberikan pondasi yang kuat bagi peneliti dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan.

Tinjauan pustaka yang pertama adalah artikel jurnal karya Maria Ryan dan Stephen Burman yang berjudul “*Globalization, Primacy, and the US-China Tech War in Emerging and Foundational Technologies*” yang diterbitkan pada *The Chinese Journal of International Politics (Oxford Academic)* Volume 18 nomor 4 (empat) tahun 2025.¹² Artikel jurnal ini membahas dinamika kebijakan pembatasan dan pelanggaran ekspor teknologi strategis Amerika Serikat terhadap Tiongkok dengan menempatkannya dalam konteks persaingan geopolitik dan ekonomi global. Literatur ini menjelaskan bagaimana kebijakan ekspor *chip* tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan keamanan nasional, tetapi juga oleh kepentingan ekonomi domestik, tekanan industri teknologi, serta posisi Amerika Serikat dalam rantai nilai global semikonduktor. Artikel ini menyoroti peran negara sebagai aktor pengatur yang berupaya menyeimbangkan kepentingan strategis dan stabilitas ekonomi, serta menunjukkan bahwa kebijakan teknologi merupakan instrumen penting dalam praktik kebijakan luar negeri kontemporer. Dengan demikian, kebijakan ekspor *chip* dipahami sebagai bagian dari strategi negara dalam mempertahankan keunggulan teknologi dan pengaruh strukturalnya dalam sistem internasional.

Kontribusi utama artikel tersebut terhadap penelitian ini terletak pada penyediaan landasan empiris dan konseptual mengenai keterkaitan antara kebijakan luar negeri, teknologi strategis, dan ekonomi politik global. Artikel

¹² Maria Rya and Stephen Burman, “Globalization , Primacy , and the US – China Tech War in ‘ Emer Ging and Foundational Technologies ,’” *The Chinese Journal of International Politics* 18, no. 4 (2025): 406–29.

ini membantu memperdalam pemahaman bahwa kebijakan ekspor *chip* tidak dapat dipahami secara sektoral atau teknokratis, melainkan harus dianalisis sebagai hasil dari interaksi antara aktor negara, kepentingan ekonomi, dan dinamika global. Temuan dan argumentasi dalam artikel tersebut memperkuat relevansi penggunaan pendekatan kualitatif dan analisis kebijakan luar negeri, serta memberikan kerangka awal untuk memahami posisi kebijakan Amerika Serikat terhadap Tiongkok dalam konteks persaingan teknologi global.

Meskipun demikian, artikel tersebut masih menyisakan ruang analisis yang dapat dikembangkan lebih lanjut, khususnya terkait proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri di tingkat domestik. Literatur ini cenderung menekankan hasil dan implikasi kebijakan, sementara pembahasan mengenai aktor pengambil keputusan, dinamika institusional, serta pertimbangan subjektif dalam perumusan kebijakan belum dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menjelaskan bagaimana interaksi kepentingan dan aktor domestik membentuk arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Tinjauan pustaka kedua yang digunakan oleh peneliti adalah artikel jurnal yang berjudul “*China’s Semiconductor Conundrum: Understanding US Export Controls and Their Efficacy*” yang diterbitkan pada *Cogent Social Sciences* (Taylor & Francis) Volume 11 nomor 1 (satu) tahun 2025.¹³ Artikel jurnal ini membahas secara komprehensif kebijakan kontrol ekspor semikonduktor Amerika Serikat terhadap Tiongkok dengan menekankan efektivitas dan keterbatasan kebijakan tersebut. Artikel jurnal ini menjelaskan bahwa

¹³ Megha Shrivastava and Amrita Jash, “China’s Semiconductor Conundrum : Understanding US Export Controls and Their Efficacy,” *Cogent Social Sciences* 11, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2528450>.

kebijakan kontrol ekspor *chip* dirancang sebagai instrumen strategis untuk membatasi kemajuan teknologi Tiongkok, khususnya dalam sektor semikonduktor canggih yang berimplikasi pada kekuatan ekonomi dan militer. Artikel ini juga menguraikan kompleksitas rantai pasok global semikonduktor, yang membuat kebijakan pembatasan ekspor tidak sepenuhnya efektif karena adanya ketergantungan lintas negara dan kemampuan Tiongkok untuk melakukan adaptasi melalui substitusi domestik dan kerja sama teknologi alternatif. Dengan demikian, artikel ini menempatkan kebijakan ekspor *chip* sebagai arena tarik-menarik antara kepentingan keamanan nasional, kepentingan ekonomi global, dan dinamika teknologi internasional.

Kontribusi utama artikel ini terhadap penelitian yang akan dilakukan terletak pada penyediaan kerangka empiris mengenai bagaimana kebijakan kontrol ekspor *chip* dijalankan serta dampaknya terhadap posisi teknologi Tiongkok dan stabilitas sistem semikonduktor global. Artikel ini memperkaya pemahaman mengenai batas efektivitas kebijakan unilateral Amerika Serikat dalam ekonomi global yang saling terhubung, serta menunjukkan bahwa kebijakan teknologi tidak dapat dilepaskan dari struktur ekonomi politik global. Temuan dalam artikel ini menjadi rujukan penting untuk memahami konteks substantif kebijakan ekspor *chip*, sekaligus memperkuat argumen bahwa kebijakan luar negeri di bidang teknologi bersifat multidimensional dan tidak semata-mata ditentukan oleh logika keamanan.

Namun demikian, artikel tersebut masih berfokus pada evaluasi kebijakan dan dampak strukturalnya, sementara proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri di tingkat domestik Amerika Serikat belum dikaji secara

mendalam. Artikel ini belum menjelaskan secara rinci bagaimana interaksi aktor-aktor pengambil keputusan, dan kepentingan industri semikonduktor memengaruhi perubahan arah kebijakan, termasuk kebijakan ekspor *chip*. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan terkait pertimbangan internal yang membentuk kebijakan ekspor *chip* Amerika Serikat ke Tiongkok pada tahun 2025.

Tinjauan pustaka ketiga adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Christopher A. Thomas yang berjudul “*China’s Semiconductor Industry under US Restriction: Policy and Reality*” yang diterbitkan pada *Institute of World Economics and Politics, Chinese Academy of Social Sciences* pada tahun 2025.¹⁴ Artikel jurnal ini mengkaji secara mendalam dampak kebijakan pembatasan dan kontrol ekspor semikonduktor Amerika Serikat terhadap perkembangan industri semikonduktor Tiongkok. Artikel ini menyoroti bagaimana kebijakan restriktif AS yang mencakup pembatasan akses terhadap teknologi manufaktur chip canggih, perangkat litografi, dan keahlian teknis yang menciptakan tekanan struktural terhadap industri semikonduktor Tiongkok. Artikel ini menjelaskan bahwa meskipun kebijakan ini berhasil memperlambat kemajuan teknologi tertentu, Tiongkok menunjukkan kapasitas adaptif melalui strategi substitusi impor, peningkatan investasi domestik, dan mobilisasi kebijakan industri nasional. Dengan demikian, kebijakan pembatasan AS dipahami tidak hanya sebagai alat pengendalian teknologi, tetapi juga sebagai faktor yang secara paradoks mendorong restrukturisasi industri teknologi Tiongkok dalam jangka panjang.

¹⁴ Global Impacts, “China ’ s Semiconductor Industry under US,” *Institute of World Economics and Politics, Chinese Academy of Social Sciences* 0 (2025): 126–42.

Kontribusi utama artikel ini terhadap penelitian yang akan dilakukan terletak pada penyediaan analisis empiris mengenai konsekuensi kebijakan ekspor teknologi Amerika Serikat terhadap aktor sasaran, yakni Tiongkok. Artikel ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana kebijakan luar negeri berbasis teknologi beroperasi dalam kerangka ekonomi politik global yang saling terhubung dan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan secara unilateral. Temuan tulisan ini memperkuat argumen bahwa kebijakan ekspor *chip* memiliki implikasi yang kompleks dan sering kali tidak linier, sehingga relevan sebagai landasan kontekstual untuk memahami signifikansi kebijakan izin ekspor *chip* dalam relasi AS-Tiongkok.

Namun demikian, artikel ini masih berfokus pada dampak kebijakan dari perspektif negara sasaran dan struktur industri, sementara proses perumusan kebijakan luar negeri di pihak Amerika Serikat belum menjadi fokus utama analisis. Artikel ini belum mengulas secara mendalam bagaimana aktor-aktor domestik Amerika Serikat, dinamika institusional, serta pertimbangan politik dan ekonomi internal memengaruhi perubahan arah kebijakan, termasuk keputusan untuk melakukan ekspor *chip*. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menelaah interaksi aktor domestik yang membentuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait ekspor *chip* ke Tiongkok.

Tinjauan pustaka keempat adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Kevin Honglin Zhang yang berjudul “*U.S.-China Economic Links and Technological Decoupling*” yang diterbitkan pada Jurnal *The Chinese Economy* (Taylor &

Francis) Volume 56 nomor lima (5) tahun 2023.¹⁵ Artikel ini mengkaji sistematis dinamika keterkaitan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok di tengah meningkatnya wacana dan praktik *technological decoupling*. Literatur ini menjelaskan bahwa meskipun terdapat eskalasi kebijakan pembatasan teknologi, kontrol ekspor, dan pembatasan investasi strategis khususnya pada sektor semikonduktor dan teknologi tinggi hubungan ekonomi kedua negara masih ditandai oleh tingkat saling ketergantungan yang signifikan. Artikel ini menekankan bahwa upaya pemisahan teknologi tidak berlangsung secara linier karena rantai pasok global, kepentingan korporasi multinasional, dan struktur produksi lintas negara justru menciptakan resistensi terhadap pemutusan hubungan ekonomi secara total. Dengan demikian, *technological decoupling* dipahami sebagai proses parsial, selektif, dan sarat akan kontradiksi dalam ekonomi politik global.

Kontribusi utama artikel ini terhadap penelitian yang akan dilakukan terletak pada penyediaan kerangka analitis untuk memahami kebijakan teknologi Amerika Serikat sebagai bagian dari strategi ekonomi politik global yang tidak sepenuhnya dapat dilepaskan dari keterkaitan struktural dengan Tiongkok. Artikel ini membantu memperjelas bahwa kebijakan pembatasan ekspor *chip* dan teknologi strategis bukan hanya respons terhadap ancaman keamanan, tetapi juga hasil dari kalkulasi ekonomi yang mempertimbangkan biaya domestik dan risiko gangguan rantai pasok global. Dengan demikian, literatur ini memperkaya pemahaman konseptual mengenai dilema kebijakan

¹⁵ Kevin Honglin Zhang, "U.S.-China Economic Links and Technological Decoupling," *The Chinese Economy* 56, no. 5 (2023): 353–65, <https://doi.org/10.1080/10971475.2023.2173399>.

luar negeri Amerika Serikat antara upaya mempertahankan keunggulan teknologi dan realitas interdependensi ekonomi global.

Namun demikian, artikel tersebut masih berfokus pada analisis struktural hubungan ekonomi dan teknologi AS-Tiongkok, sementara proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri di tingkat domestik Amerika Serikat belum dibahas secara mendalam. Literatur ini belum secara spesifik menguraikan bagaimana aktor-aktor pengambilan keputusan, dinamika institusional, serta kepentingan industri teknologi memengaruhi perubahan arah kebijakan, termasuk keputusan terkait ekspor chip. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan guna menelaah bagaimana interaksi antar aktor, kepentingan, dan posisi institusi yang berpengaruh dalam membentuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait ekspor *chip* ke Tiongkok.

Tinjauan pustaka kelima adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Ming-Chin Monique Chu yang berjudul “*China’s Semiconductor Industrial Base in an Age of Globalisation: Cross-Strait Dynamics and Regional Security Implications*” yang diterbitkan pada *The Journal of Strategic Studies*, Volume 47, nomor lima (5).¹⁶ Artikel ini mengkaji perkembangan basis industri semikonduktor pertahanan Tiongkok dalam konteks globalisasi ekonomi dan dinamika lintas selat (*cross-strait*) antara Tiongkok dan Taiwan. Literatur ini menekankan bahwa semikonduktor memiliki posisi strategis tidak hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai elemen krusial dalam kapabilitas pertahanan dan keamanan nasional. Artikel ini juga menjelaskan

¹⁶ Ming-chin Monique Chu and Ming-chin Monique Chu, “China ’ s Defence Semiconductor Industrial Base in an Age of Globalisation : Cross-Strait Dynamics and Regional Security Implications Regional Security Implications,” *Journal of Strategic Studies* 47, no. 5 (2024): 643–68, <https://doi.org/10.1080/01402390.2023.2164852>.

bahwa ketergantungan Tiongkok terhadap rantai pasok global, khususnya pada teknologi canggih yang banyak diproduksi di Taiwan, menciptakan kerentanan struktural dalam industri pertahanan Tiongkok. Artikel ini juga menunjukkan bagaimana globalisasi produksi semikonduktor membatasi otonomi negara dalam sektor pertahanan, sekaligus meningkatkan sensitivitas geopolitik kawasan Asia Timur, terutama dalam konteks keamanan regional dan stabilitas lintas selat.

Kontribusi utama artikel ini terhadap penelitian yang akan dilakukan terletak pada penegasan hubungan erat antara kebijakan teknologi, keamanan nasional, dan struktur rantai pasok global. Artikel ini memperkaya pemahaman bahwa kebijakan pembatasan ekspor semikonduktor Amerika Serikat tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi sipil, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap kemampuan pertahanan dan kalkulasi strategis Tiongkok. Dengan menyoroti keterkaitan antara industri semikonduktor, globalisasi, dan keamanan regional, artikel ini memberikan landasan penting untuk memahami mengapa teknologi *chip* menjadi instrumen utama dalam kebijakan luar negeri dan *economic statecraft* Amerika Serikat terhadap Tiongkok.

Namun demikian, artikel ini masih memusatkan analisis pada dampak struktural globalisasi dan implikasi keamanan regional, sementara dimensi proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat belum dibahas secara mendalam. Literatur ini belum mengkaji bagaimana aktor-aktor domestik di Amerika Serikat, kepentingan industri teknologi, serta keputusan pencabutan atau pelonggaran larangan ekspor chip. Oleh karena itu, penelitian

ini hadir untuk menganalisis bagaimana interaksi antar aktor, kepentingan, dan posisi institusi berimplikasi pada pembentukan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam konteks persaingan teknologi dan keamanan nasional.

1.7 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian hubungan internasional, kerangka konseptual berfungsi sebagai alat analisis untuk membantu peneliti memahami suatu fenomena berdasarkan teori dan konsep yang digunakan. Kerangka konseptual membantu peneliti dalam mengidentifikasi aktor, dinamika, serta hubungan antar faktor yang memengaruhi suatu kebijakan. Selain itu, kerangka konseptual juga digunakan untuk mengarahkan proses analisis agar penelitian berjalan secara sistematis dan terfokus. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual disusun menggunakan pendekatan *The Governmental Politics Model* oleh Graham T. Allison dalam bukunya yang berjudul “*Essence of Decision*”.¹⁷

1.7.1 *The Governmental Politics Model*

Pendekatan *Governmental Politics Model* yang dikembangkan oleh Graham T. Allison menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri bukan merupakan hasil keputusan tunggal negara sebagai aktor rasional (*unitary rational actor*), melainkan hasil interaksi politik antaraktor pemerintahan di dalam struktur negara. Dalam bukunya *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*, Allison dan Philip Zelikow menolak pandangan tradisional yang melihat negara sebagai entitas tunggal yang bertindak secara rasional dan konsisten dalam setiap pengambilan keputusan.

¹⁷ Graham Allison and Philip Zelikow, *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*, 2nd Edition (New York: Longman, 1999).

Menurut Allison dan Zelikow, kebijakan luar negeri merupakan *political resultant*, yaitu hasil akhir dari proses tawar-menawar, kompromi, dan negosiasi antaraktor pemerintahan yang memiliki kepentingan dan pengaruh berbeda.

Dalam perspektif ini, negara dipahami sebagai arena politik internal tempat berbagai lembaga pemerintah saling berinteraksi dan memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Setiap aktor membawa preferensi yang dipengaruhi oleh posisi kelembagaan yang ditempatinya dalam struktur pemerintahan. Oleh sebab itu, kebijakan luar negeri tidak selalu mencerminkan kepentingan nasional yang objektif, tetapi sering kali merupakan hasil kompetisi politik antaraktor dan antarlembaga negara.

Kondisi tersebut dirumuskan Allison melalui prinsip terkenal “*where you stand depends on where you sit*”, yang menunjukkan bahwa sikap dan preferensi kebijakan seseorang dipengaruhi oleh posisi institusional yang dimilikinya dalam birokrasi pemerintahan. Berdasarkan penjelasan Allison dan Zelikow, terdapat lima faktor utama yang mendorong terbentuknya kebijakan luar negeri. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan bekerja melalui proses tawar-menawar politik antaraktor pemerintahan.

1. *Organizational Interests*

Dalam perspektif *Governmental Politics Model*, setiap lembaga negara memiliki kepentingan organisasi, prioritas kebijakan, budaya birokrasi, serta orientasi strategis yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut menyebabkan masing-

masing lembaga memandang suatu isu internasional dari perspektif yang tidak selalu sama. Kementerian luar negeri cenderung menekankan diplomasi dan kerja sama internasional, sedangkan kementerian pertahanan lebih berorientasi pada aspek keamanan nasional dan strategi militer.

Allison dan Zelikow menjelaskan bahwa organisasi birokrasi pada dasarnya berupaya mempertahankan kepentingan institusionalnya masing-masing karena berkaitan dengan legitimasi dan kewenangan lembaga tersebut. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri sering kali merupakan hasil kompromi antaragenda organisasi yang berbeda. Perbedaan kepentingan tersebut kemudian memengaruhi preferensi kebijakan yang diperjuangkan oleh masing-masing lembaga dalam proses pengambilan keputusan.

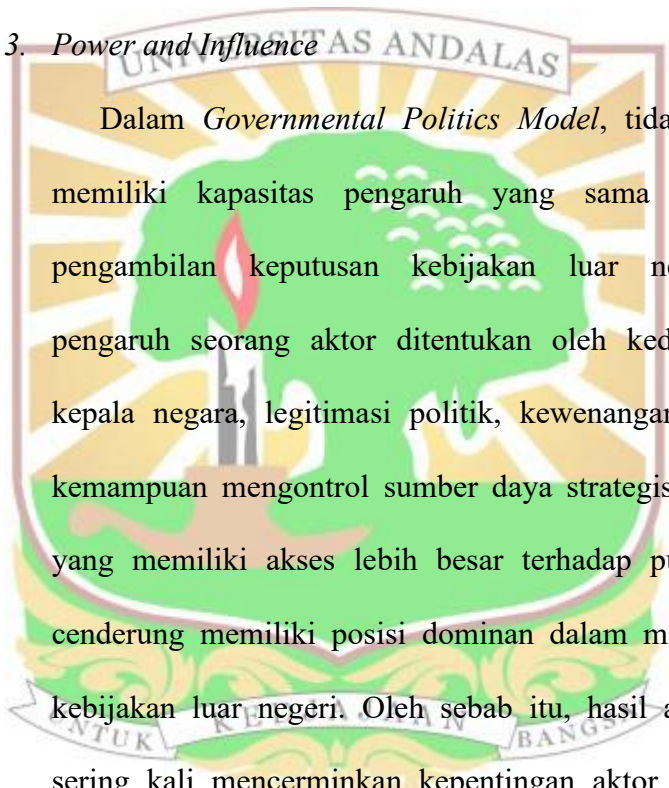
2. *Governmental Position*

Allison menjelaskan bahwa posisi kelembagaan seorang aktor dalam pemerintahan sangat menentukan cara pandangnya terhadap suatu isu internasional. Setiap aktor akan melihat persoalan berdasarkan fungsi birokratis lembaga yang diwakilinya. Oleh karena itu, aktor yang berasal dari lembaga berbeda akan memiliki orientasi dan preferensi kebijakan yang berbeda pula.

Prinsip “*where you stand depends on where you sit*” menunjukkan bahwa posisi struktural menjadi faktor penting

dalam menentukan sikap politik seorang pejabat negara. Seorang pejabat pertahanan cenderung memandang isu internasional dari sudut keamanan nasional, sedangkan pejabat ekonomi lebih menekankan stabilitas perdagangan dan investasi internasional. Dengan demikian, posisi birokratis memengaruhi preferensi kebijakan luar negeri yang diperjuangkan masing-masing aktor.

3. *Power and Influence*

The logo of Universitas Andalas is a circular emblem. It features a green tree in the center, with a red flame or torch at its base. The tree is set against a yellow background with radiating lines. The words 'UNIVERSITAS ANDALAS' are written in a banner at the top, and 'UNTUK KEMERDEKAAN BANGSA' is written in a banner at the bottom.

Dalam *Governmental Politics Model*, tidak semua aktor memiliki kapasitas pengaruh yang sama dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Tingkat pengaruh seorang aktor ditentukan oleh kedekatan dengan kepala negara, legitimasi politik, kewenangan formal, serta kemampuan mengontrol sumber daya strategis negara. Aktor yang memiliki akses lebih besar terhadap pusat kekuasaan cenderung memiliki posisi dominan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri. Oleh sebab itu, hasil akhir kebijakan sering kali mencerminkan kepentingan aktor yang memiliki kekuasaan politik lebih besar dibandingkan aktor lainnya.

4. *Control over Information and Resources*

Allison dan Zelikow menjelaskan bahwa informasi merupakan sumber kekuasaan yang sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri. Aktor yang memiliki akses terhadap data intelijen, informasi diplomatik, laporan

keamanan, maupun kapasitas administratif negara memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam memengaruhi arah keputusan pemerintah.

Distribusi informasi di dalam birokrasi pemerintahan tidak selalu merata sehingga menciptakan ketimpangan pengaruh antaraktor. Selain informasi, penguasaan terhadap sumber daya negara seperti anggaran dan instrumen implementasi kebijakan juga memperkuat kapasitas pengaruh suatu lembaga. Dengan demikian, penguasaan informasi dan sumber daya menjadi faktor penting dalam menentukan kekuatan politik aktor birokrasi.

5. *Action Channels*

Faktor *action channels* merujuk pada prosedur formal maupun informal yang menentukan bagaimana suatu isu diproses di dalam pemerintahan. Faktor ini mencakup mekanisme rapat kabinet, koordinasi antar kementerian, prosedur keamanan nasional, hingga jalur komunikasi politik dan birokrasi negara.

Allison dan Zelikow menegaskan bahwa hasil kebijakan luar negeri tidak hanya ditentukan oleh substansi isu internasional, tetapi juga oleh siapa yang terlibat dan melalui jalur institusional apa isu tersebut diproses. Oleh karena itu, saluran tindakan (*action channels*) dapat memperkuat maupun membatasi pengaruh aktor tertentu dalam proses pembentukan

kebijakan luar negeri. Faktor ini menunjukkan bahwa prosedur birokrasi memiliki peran penting dalam menentukan arah dan hasil kebijakan negara.

Kelima faktor tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berinteraksi melalui proses tawar-menawar (*bargaining process*) antar aktor pemerintahan. Proses tawar-menawar tersebut menjadi mekanisme utama yang menghubungkan berbagai kepentingan, posisi birokrasi, pengaruh politik, penguasaan sumber daya, dan prosedur kelembagaan hingga akhirnya menghasilkan kebijakan luar negeri sebagai *political resultant*. Dengan demikian, *Governmental Politics Model* memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami dinamika politik internal pemerintahan memengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri dalam suatu negara.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis data guna memahami suatu fenomena secara sistematis dan mendalam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena bertujuan untuk memahami faktor-faktor politik domestik yang mendorong terbentuknya kebijakan ekspor *chip* Amerika Serikat ke Tiongkok pada tahun 2025. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan dinamika politik dan interaksi antar aktor birokrasi yang bersifat kompleks dan kontekstual. Menurut Christopher

Lamont, penelitian kualitatif dalam studi hubungan internasional digunakan untuk memahami makna, proses, dan dinamika politik di balik suatu fenomena melalui interpretasi mendalam terhadap data dan konteks sosial-politik.¹⁸ Oleh karena itu, metode ini relevan digunakan untuk menganalisis faktor politik domestik yang melibatkan berbagai aktor pemerintahan dalam pembentukan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-eksplanatif dengan tujuan menjelaskan bagaimana faktor-faktor dalam *The Governmental Politics Model* bekerja dan saling berinteraksi dalam pembentukan kebijakan ekspor *chip* AS ke Tiongkok. Fokus penelitian ini diarahkan pada identifikasi kepentingan organisasi, posisi birokrasi, kekuasaan dan pengaruh, penguasaan informasi dan sumber daya, serta *action channels* yang memengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus eksplanatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami proses, dinamika, serta makna di balik pembentukan kebijakan luar negeri, bukan mengukur hubungan kausal secara statistik. Metode studi kasus eksplanatif memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam satu kasus spesifik, yaitu kebijakan ekspor *chip* AS ke Tiongkok, sebagai fenomena yang kompleks dan kontekstual. Melalui studi kasus, peneliti dapat menelusuri secara komprehensif dinamika politik domestik dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, termasuk

¹⁸ Christopher Lamont, *Research Methods in International Relations* (London: SAGE Publications, 2015), <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/research-methods-in-international-relations/book241151>.

interaksi antaraktor birokrasi, kepentingan organisasi, posisi pemerintahan, serta pengaruh kekuasaan dan sumber daya dalam proses pengambilan keputusan kebijakan ekspor *chip* Amerika Serikat ke Tiongkok tahun 2025.

1.8.2 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ditentukan untuk menegaskan ruang lingkup penelitian agar tetap fokus dan terukur. Rentang waktu yang digunakan pada penelitian dari awal tahun 2025 hingga 2026. Tahun 2025 dipilih karena merupakan tahun mulai diberlakukannya kebijakan ekspor *chip* ke Tiongkok. Tahun 2026 menjadi batas akhir penelitian karena kebijakan ini masih berlanjut pada saat peneliti melakukan penelitian terkait isu ini, yaitu pada tahun 2026.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Menurut John W. Creswell, unit analisis merupakan fokus utama yang diteliti dalam suatu penelitian, baik berupa individu, kelompok, organisasi, peristiwa, maupun proses sosial tertentu yang dianalisis secara mendalam dalam penelitian kualitatif.¹⁹ Penentuan unit analisis penting untuk membantu peneliti memusatkan perhatian terhadap fenomena yang diteliti secara sistematis dan kontekstual. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah faktor-faktor politik domestik yang memengaruhi terbentuknya kebijakan ekspor chip Amerika Serikat ke Tiongkok tahun 2025, dengan variabel meliputi, kepentingan organisasi, posisi birokrasi, kekuasaan dan pengaruh, kontrol atas informasi dan sumber daya, serta *action channels*. Sedangkan unit eksplanasinya adalah kebijakan ekspor chip Amerika Serikat ke Tiongkok tahun 2025.

¹⁹ John W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3rd Edition (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2009), <https://www.sagepub.com>.

Sedangkan, tingkatan analisis merupakan kerangka yang digunakan untuk menjelaskan fenomena politik internasional berdasarkan aktor atau struktur tertentu. Dalam pendekatan politik birokrasi, Morton Halperin menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri sebuah negara merupakan hasil dari proses persaingan, kompromi, dan negosiasi antar aktor birokrasi di dalam pemerintahan. Menurut Halperin, setiap lembaga birokrasi memiliki kepentingan, persepsi ancaman, serta preferensi kebijakan yang berbeda sesuai dengan posisi dan fungsi institusionalnya. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri tidak dipahami sebagai keputusan tunggal negara yang sepenuhnya rasional, melainkan sebagai hasil interaksi politik antar birokrasi domestik.²⁰

Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan tingkat analisis birokrasi domestik dalam level negara, karena berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya kebijakan peningkatan ekspor *chip* yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah, seperti Departemen Perdagangan AS, Departemen Pertahanan, dan aktor politik domestik lainnya. Dengan demikian, hubungan antara unit analisis dan unit eksplanasi dalam penelitian ini mengikuti model induksionis, karena penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana dinamika politik domestik dan persaingan antar birokrasi memengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait ekspor *chip* ke Tiongkok.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan data sekunder. Menurut

²⁰ Morton H Halperin, Priscilla Clapp, and Arnold Kanter, *Bureaucratic Politics and Foreign Policy* (Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1974).

Lawrence Neuman, studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai dokumen, literatur, arsip, dan sumber tertulis untuk memahami suatu fenomena secara sistematis.²¹ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang relevan dengan faktor-faktor politik domestik yang mempengaruhi terbentuknya kebijakan ekspor *chip* Amerika Serikat ke Tiongkok tahun 2025. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat mengumpulkan berbagai informasi empiris maupun konseptual yang mendukung analisis penelitian. Adapun kata kunci disusun berdasarkan empat kelompok utama yaitu, kebijakan ekspor semikonduktor, institusi pemerintah AS, persaingan teknologi AS-Tiongkok, serta keamanan nasional dan industri *chip*.

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan berbagai sumber berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah Amerika Serikat, laporan lembaga internasional, think tank, serta media internasional yang kredibel. Dokumen pemerintah yang digunakan meliputi arsip dari *Bureau of Industry and Security* (BIS), Departemen Perdagangan AS, Gedung Putih, Kongres AS, Departemen Pertahanan AS, dan *US International Trade Commission* terkait kebijakan ekspor semikonduktor, keamanan nasional, serta persaingan teknologi AS-Tiongkok. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan laporan dari media internasional seperti The New York Times, Reuters, dan Bloomberg sebagai pendukung analisis. Melalui teknik pengumpulan data ini, peneliti berupaya memperoleh data empiris dan konseptual yang relevan dengan fokus penelitian.

²¹ W Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, 6th Edition (Boston: Pearson/Allyn and Bacon, 2006).

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam studi ini, penulis menerapkan metode analisis data kualitatif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang terdiri dari tiga langkah yaitu, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.²²

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap pemilihan dan penyederhanaan data dari beragam sumber agar tetap sesuai dengan topik penelitian. Data dikelompokkan berdasarkan kata kunci utama, seperti kebijakan ekspor semikonduktor, institusi pemerintah Amerika Serikat, persaingan teknologi AS-Tiongkok, serta keamanan nasional dan industri *chip*. Kata kunci ini membantu peneliti memilah informasi yang relevan dari berbagai literatur, sehingga analisis terhadap faktor-faktor politik domestik yang memengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri AS terkait ekspor chip dapat dilakukan secara lebih terfokus. Proses ini mencakup seleksi, pemusatan perhatian, penyederhanaan, abstraksi, serta transformasi data dari berbagai sumber referensi.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data. Tahap ini bertujuan untuk menyusun informasi yang telah diringkas ke dalam format yang teratur dan sistematis guna memudahkan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, data yang telah melalui proses reduksi disajikan dalam bentuk narasi terstruktur yang menguraikan

²² Matthew B Miles and A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd Edition (Thousand Oaks: SAGE Publications, 1994), <https://sk.sagepub.com/books/qualitative-data-analysis>.

faktor-faktor politik domestik yang membentuk kebijakan peningkatan ekspor *chip* AS. Penyajian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai keterkaitan antara tekanan politik dalam negeri dan dinamika birokrasi yang mempengaruhi kebijakan luar negeri AS.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan guna menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan analisis yang mendalam yang dilakukan sepanjang proses penelitian.

1.9 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab satu, penulis akan memaparkan penjelasan terkait latar belakang dari penelitian. Kemudian, dilanjutkan dengan rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara akademis ataupun praktis, tinjauan pustaka untuk memperoleh kebaharuan dalam penelitian, kerangka konseptual untuk mempermudah dalam analisis. Bab ini ditutup dengan metode, jenis, unit dan level penelitian disertai dengan teknik pengumpulan data dan analisis data yang ditutup dengan sistematika penulisan.

BAB II HUBUNGAN KERJA SAMA PERDAGANGAN AS-TIONGKOK

Bab ini membahas perkembangan dan karakteristik kerja sama ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam konteks global. Pembahasan mencakup sejarah singkat hubungan ekonomi kedua negara, pola ketergantungan dan rivalitas ekonomi, serta faktor-faktor struktural dan politik yang memengaruhi dinamika hubungan tersebut. Bab ini berfungsi sebagai landasan kontekstual untuk memahami posisi strategis sektor teknologi dan semikonduktor dalam hubungan bilateral AS-Tiongkok.

BAB III KEBIJAKAN EKSPOR CHIP AS KE TIONGKOK

Pada bab tiga, penulis akan mengkaji kebijakan ekspor chip AS ke Tiongkok, dengan menitikberatkan pada kebijakan ekspor chip tiga tahun ke belakang (2023-2025). Dengan mengkaji kebijakan ekspor chip AS selama beberapa tahun terakhir, diharapkan dapat menampilkan perbedaan kebijakan dari tahun ke tahun. Bab ini juga menyoroti pengaruh politik domestik dalam membentuk kebijakan ekspor chip AS ke Tiongkok

BAB IV ANALISIS FAKTOR POLITIK DOMESTIK KEBIJAKAN LUAR NEGERI AS TERHADAP EKSPOR *CHIP* KE TIONGKOK

Bab ini merupakan inti analisis penelitian yang membahas kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait ekspor chip ke Tiongkok. Analisis difokuskan pada analisis faktor politik domestik AS, interaksi antara preferensi individu aktor kebijakan dan kekuatan institusional, serta hasil kebijakan yang diwujudkan

dalam bentuk aturan teknis, persyaratan lisensi, dan mekanisme pengawasan. Bab ini bertujuan menjelaskan bagaimana dinamika politik domestik dan kepentingan strategis memengaruhi arah kebijakan ekspor chip AS.

BAB V PENUTUP

Bagian ini memuat kesimpulan yang merangkum temuan utama penelitian serta menjawab rumusan masalah yang telah diajukan.

Selain itu, bab ini juga menyajikan implikasi teoritis dan praktis dari hasil penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

